

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Raja Grafindo Persada 2004, Jakarta.

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

- Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Justitia, Surabaya 2014.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, Hal. 472.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004.
- Et all Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas IndonesiaBadan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Seri PeraturanJabatan Notaris, Zifatama Publisher, Jakarta, 2014.
- Habib Adjie, 2008, Hal. 87, dikutip dari R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariatdi Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media, Bandung.

Habib Adjie, 2008, Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2008, Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, Penebar Swadaya, Jakarta, 2016, hal. 42.

JHA Logemann, Over de Theorie van de Stellig Staatsrecht, Saksana, Jakarta, 1954 dalam Dominikus Rato.

Lukman Surya Saputra "Pendidikan Kewarganegaraan" (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Moh Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000.

O.P. Simorangkir, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.

Patrik Purwahid, 1988, Hukum Perdata II, Undip, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pieter E. Latumeten, 2011, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya, Tuma Press, Jakarta.

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, PT. Sofmedia, 2011.

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim, HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS, 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta), Edisi 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, R, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta,

Supriadi, Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Jogjakarta, 1995.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

## **Jurnal**

Idris Aly Fahmi, 2013, Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Arena Hukum, Nomor 2 Volume 6.

Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya”, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April 2002.

Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum tulisan Mufti Khakum (2017).

Penguatan Kode Etik Notaris <https://mkn.unissula.ac.id/perlunya-penguatan-kode-etik-notaris-dalam-pelaksanaan-jabatannya/> Diakses pada 20 Maret 2023.

Pratis Widyalestari, “Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.